

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Haris Budiman. *Hukum Tata Ruang Rekontruksi Kebijakan Di Daerah*, YK Publishing, Kuningan, 2022.
- Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, Sai Wawai Publishing, Lampung, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2014.
- Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, 2018.

B. Jurnal Ilmiah

- Agang, Muhammad Ilham. “*Efektifitas Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Dalam Menegakkan Keadilan Pemilu.*” *Jurnal Akta Yudisia* 4, no. 1 (2019): 23–38.
- Alwy, Sabir, and Afdhal Afdhal. “*Perjanjian Terapeutik Sebagai Dasar Bagi Dokter Dalam Meakukan Penanganan Medis.*” *Jurnal Akta Yudisia* 4, no. 1 (2019): 1–22.
- Amal, Bakhrul. “*Tinjauan Hukum Terhadap Frasa ‘Tanpa Persetujuan Korban’ Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual.*” *Crepido* 3, no. 2 (2021): 86–95.

- Ardiansyah, Eikel, Wiwiek Nurkomala Dewi, and Chairun Nas. “*Rancang Bangun Animasi Sosialisasi Cirebon Lawan Hoax Pada Masyarakat Kota Cirebon Membangun Critical Thinking Di Era Digitalisasi.*” *Jurnal Digit* 13, no. 2 (2023): 178.
- Ariawan, Gede Agre Wiradipa, Muhammad Zaki Sierrad, and Gusti Fadhil Fithrian Luthfan. “*Implementasi Undang-Undang Tentang Informasi Dan Teknologi Elektronik Terkait Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Dunia Maya Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Indonesia.*” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2023): 809–820.
- Arifin, Miftah. “*Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian.*” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66.
- Arliman. S, Laurensius. “*Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia.*” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, no. 1 (2019): 1–20.
- Baehaqi, Eki Sirojul. “*Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana.*” *Annahdliyyah Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022): 12–26. <http://ojs.stainutasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyyah/article/view/13>.
- Basuki, Udiyo, and R. Hendradi Setyawan. “*Langkah Strategis Menangkal Hoax: Suatu Pendekatan Kebijakan Dan Hukum.*” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 1–22.
- Chumairoh, Hanik. “*Ancaman Berita Bohong Di Tengah Pandemi Covid-19.*” *Vox Populi* 3, no. 1 (2020): 22.
- Disemadi, Hari Sutra. “*Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies.*” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289.

- Dwicky Cahyadi, Antonius. “Yurisdiksi Transaksi Elektronik Internasional Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 23.
- Dwinanda, Renza Ardhita. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media.” *Jurnal Panorama Hukum* 4, no. 2 (2019): 114–123.
- Endang, Suparta. “Analisis Yuridis Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Juridical.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 67–73.
- Engka, Ferky Fernando. “Delik Pengelapan Berat (Pasal 374 KUHP) Dan Pemakaian Barang (Pasal 315 KUHP) Oleh Pemegang Barang Kerena Pekerjaanya.” *Journal information* 10, no. 3 (2023): 1–16.
- Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri. “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 2 (2020): 219.
- Hamid, Muhammad Farhansyah. “Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 19 Tahun 2014.” *DHARMASISYA* 2, no. 3 (2023): 1373–1390.
- Haris Budiman. *Rekontruksi Kebijakan Di Daerah*, 2022. www.ykpublishing.id.
- Heriyono. “Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya.” *Jurnal Universitas Muhamadiyah Palembang* 1, no. 1 (2020): 1–18.
- Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin. “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif

- Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–127.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. “Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 1.
- Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer.” *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (2021): 46–68.
- Isnantiana, Nur Iftitah. “Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 19.
- Kurniawati, Yunita Rahayu. “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial.” *dDnamika: Jurnal Ilmu Hukum* 26, no. 4 (2020): 422–437. <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5492/4699>.
- Laia, Fianusman. “Analisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan Terhadap Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 62–78. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPK/article/view/519>.
- Lewan, Eldmer C.G. “Artikel Skripsi Pasal 14 Dan Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946” VIII, no. 5 (2019): 97–105.
- Lubis, Alwin Rais, Bahmid, and Suriani. “Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online.” *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (2019): 16–30. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/943>.
- Maaliki, Naavi’u Emal, and Eko Soponyono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong.” *Jurnal*

Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 1 (2021): 59–69.

Mahanani, Anajeng Esri Edhi. “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01 (2019): 1–10.

Mufid, Firda Laily, and Tioma Roniuli Hariandja. “Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax).” *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (2019): 179–198.

Muhammad Gazali Rahman. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Al-Himayah* 4, no. Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah (2020): 142–159. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>.

Muttaqien, Faisal Azis, and Anang Dony Irawan. “Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19.” *Media of Law and Sharia* 2, no. 4 (2021): 305–315.

Nabawiyah, Habsatun, and Ana Istianah. “Hoax Di Era Digital: Solusi Al-Qur’an Dalam Menyikapi Berita Hoax” 1, no. 1 (2022): 40–61.

Nurpatria, B, and A R Ras. “UU ITE: Kebebasan Berpendapat, Informasi Hoax Terhadap Ancaman Stabilitas Ketahanan Nasional.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1972 (2022): 10220–10229. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4031><https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/4031/3367>.

Pakpahan, Roida. “Analisis Fenomena Hoax Diberbagai Media Sosial Dan Cara Menanggulangi Hoax.” *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST)* 1, no. 1 (2017): 479–484. <http://seminar.bsi.ac.id/knist/index.php/UnivBSI/article/view/184>.

Pamungkas, Fauzi Akbar, Sukimin Sukimin, and A. Heru Nuswanto. “Penerapan Electronic Voting Sebagai Perwujudan Asas Luber Dan Jurdil Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bendosari Kecamatan

- Sawit Kabupaten Boyolali.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 78.
- Pranata, Dika, and Jami Robekha. “Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice” 2, no. 1 (2022): 85–94.
- Putra, Ida Bagus Gede Arimbawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 476–481.
- Putri, Rianda Prima. “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2019): 145–149.
- Putri, Yosi Novrisa. “Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 114 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Nomor. 24 / Pid.Sus/2018 /PN. Tlk).” *Juhanperak* 7 (2021): 935–948.
- Rahmasari, Nuzul Shinta Nur, and Hari Soeskandi. “Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 27–49.
- Rahmawati, Nur, Muslichatun Muslichatun, and M Marizal. “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Iti.” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2021): 62–75.
- Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana. R Hendrik Pondaag. “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp.” *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020): 249–257. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30832>.

- Sadewo, Doly Afandi, Nelvitia Purba, and Adil Akhyar. "Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Anggota Brimobyang Melakukan Pelanggaran Etikkepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)" 2, no. 3 (2023): 34–49.
- SafSafitri, N. A. (2020). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. Convention Center Di Kota Tegal, 938, 6–37. itri, Niluh Ari. "Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka." *Convention Center Di Kota Tegal*, no. 938 (2020): 6–37.
- Sari, Indah. "Unsur-Unsur Delik Materiel Dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019): 64–80. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/404/374>.
- Sejati, Hono, and Ngudiyono Ngudiyono. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia" 3, no. 1 (2020): 19–25. <http://www.unhas.ac.id/tahir/Bahan-Kuliah/00-Fika-data/TESIS LENGKAP dr. Zulfikar T.>
- Sipayung, Sonia Christy, and R Rahaditya. "Analisis Penerapan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dan Pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kasus Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosia." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 4325–4344.
- Suroso, Joko. "Penegakan Hukum, Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pemblokiran, Situs Internet Bermuatan Negatif." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* (2019): 39–49.

- Susanto, Ari. “Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoak Yang Menimbulkan Kebencian Di Kalangan Masyarakat.” *FOCUS: Jurnal of Law* 3, no. 1 (2022): 6–10.
- Suyatno. “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia.” *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 2, no. 1 (2019): Hal. 199-200.
- Syam, Saiful, Mukidi, and Didik Miroharjo. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” 4, no. 2 (2022): 80–101.
- Tri, Erna, Rusmala Ratnawati, Fakultas Hukum, Universitas Widya, and Perlindungan Hukum. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong.” *Jurnal PRANATA HUKUM* Vol. 3, no. No.1 (2021): 90–104.
- Utama, Andrew Shandy. “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–313.
- Wijaya, Frida Nur Amalina. “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia).” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, no. 2 (2019): 126.

C. Internet

- Dewa Ketut Sudiarta Wiguna, Bamus Betawi minta polisi usut Abu Janda soal video hoaks Anies,
<https://www.antaraneews.com/berita/2985169/bamus-betawi-minta->

olisi-usut-abu-janda-soal-video-hoaks-anies, (2022). Diakses pada tanggal 26 Januari 2024.

Moch S Hendrowijono, Peraturan Pemerintah 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi dan Terorisme, <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/21092861/pp-71-2019-jadi-andalan-pemerintah-awasi-konten-pornografi-dan-terorisme>, (2019). Diakses 30 Mei 2024.

Siaran pers KOMINFO No.123/HM/KOMINFO/06/2023, Sampai Mei 2023, Kominfo Identifikasi 11.642 Konten Hoaks, https://www.kominfo.go.id/content/detail/49914/siaran-pers-no123hmkominfo062023-tentang-sampai-mei-2023-kominfo-identifikasi-11642-konten-hoaks/0/siaran_pers, (2023). Diakses pada tanggal 21 Januari 2024.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.